

PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PETANI JAGUNG DI KEC. PANTI KAB. PASAMAN

Afifah Dwi Putri Ritonga¹, Jon Kenedi²

^{1, 2} Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek

Alamat e-mail : afifahritonga14@gmail.com¹, jonkenedi@uinbukittinggi.ac.id²

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that although corn is one of the main and strategic agricultural commodities in Panti District, Pasaman Regency, the productivity and welfare of corn farmers are still relatively low. The main problems faced by farmers include limited business capital, market price fluctuations, low adoption of agricultural technology, and limited access to government assistance. Therefore, the government's role is crucial in encouraging increased income and productivity of farmers through the provision of production input assistance, technical training, and facilitation of access to capital and technology. The purpose of this study is to analyze the government's role in helping increase the income and productivity of corn farmers in Panti District, both through direct intervention and strengthening farmer institutions. This study uses a qualitative-descriptive approach with data collection methods through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants consisted of corn farmers, agricultural extension workers, and village officials. The results show that government assistance in the form of seeds, subsidized fertilizer, agricultural machinery, and extension programs has had a positive impact on farmers who are members of farmer groups. However, most small farmers still experience obstacles in accessing assistance due to administrative limitations, low participation, and lack of information. Price fluctuations, limited capital, and minimal technology adoption are also challenges that have not been fully addressed by existing policies. The conclusion of this study confirms that the government's role is significant but not yet optimal. A more inclusive, locally based, and sustainable policy approach is needed. Strengthening farmer capacity, intensive mentoring, and reforming the aid distribution bureaucracy are important strategies to support corn productivity and improve farmer welfare in Panti District.

Keywords: Corn Farmers, Government Role, Productivity

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa meskipun jagung merupakan salah satu komoditas pertanian utama dan bernilai strategis di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, namun produktivitas dan kesejahteraan petani jagung masih tergolong rendah. Permasalahan utama yang dihadapi petani antara lain

keterbatasan modal usaha, fluktuasi harga pasar, rendahnya adopsi teknologi pertanian, serta akses yang terbatas terhadap bantuan pemerintah. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat krusial dalam mendorong peningkatan pendapatan dan produktivitas petani melalui penyediaan bantuan sarana produksi, pelatihan teknis, serta fasilitasi akses permodalan dan teknologi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam membantu meningkatkan pendapatan dan produktivitas petani jagung di Kecamatan Panti, baik melalui intervensi langsung maupun penguatan kelembagaan tani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan terdiri dari petani jagung, penyuluh pertanian, dan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan pemerintah berupa bibit, pupuk subsidi, alsintan, dan program penyuluhan telah memberikan dampak positif terhadap petani yang tergabung dalam kelompok tani. Namun, sebagian besar petani kecil masih mengalami hambatan dalam mengakses bantuan karena keterbatasan administratif, rendahnya partisipasi, dan kurangnya informasi. Fluktuasi harga, keterbatasan modal, dan minimnya adopsi teknologi juga menjadi tantangan yang belum sepenuhnya diatasi oleh kebijakan yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa peran pemerintah cukup penting namun belum optimal. Diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, berbasis kebutuhan lokal, dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas petani, pendampingan intensif, dan reformasi birokrasi distribusi bantuan menjadi strategi penting untuk mendukung produktivitas jagung dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Panti.

Kata Kunci: Petani Jagung , Peran Pemerintah, Produktivitas

A. Pendahuluan

Jagung merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensial untuk dikembangkan. Meskipun jagung di Indonesia merupakan komoditi pangan terpenting kedua setelah padi/beras, namun sebagian masyarakat di Indonesia jagung masih merupakan komoditi pangan andalan. Kebutuhan jagung nasional dari tahun ke tahun terus meningkat, tidak hanya karena pertambahan penduduk, tetapi juga karena pertumbuhan usaha peternakan dan industri pangan. Selain untuk

pengadaan pangan dan pakan, jagung juga banyak digunakan industri makanan, minuman, kimia, dan farmasi. Berdasarkan komposisi kimia dan kandungan nutrisi, jagung mempunyai prospek sebagai pangan dan bahan baku industri. Pemanfaatan jagung sebagai bahan baku industri akan memberi nilai tambah bagi usahatani komoditas tersebut (Puspitasari, 2021). Jagung dapat pula diproses menjadi minyak goreng, margarin, dan formula makanan. Pati jagung dapat digunakan sebagai bahan baku industri farmasi dan makanan seperti

es krim, kue, dan minuman (Wahyuni, 2019).

Tabel 1 Data Bantuan Petani Jagung Tahun 2024

No	Nama	Luas Lahan	Jumlah Bibit
1	Hamdan	15	325
2	Adnan	15	325
3	Ali Monang	15	325
4	Husin	15	325
5	Yulizar	15	325
6	Amril	15	325
7	Rame Sirait	10	250
8	Abu Salim	10	250
Jumlah			2.400

Sumber : BPP Panti (Balai Penyuluhan Pertanian) Kec. Panti Tahun 2024

Kab. Pasaman adalah salah satu Kab. di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ibu kota Kab. ini terletak di Lubuk Sikaping. Pasaman merupakan sebuah daerah yang signifikan dalam industri pertanian Indonesia, terutama dalam produksi jagung (Rahman, 2021). Namun, petani di daerah ini masih menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya aksesibilitas ke sumber daya dan bantuan yang kuat. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengelola alokasi dana bantuan petani jagung menjadi sangat penting untuk meningkatkan produksi dan kemandirian petani. Masalah Utama petani jagung yaitu:

Pertama Aksesibilitas Bantuan, banyak petani di Pasaman yang belum atau tidak tergabung dalam kelompok tani, sehingga mereka tidak mendapat bantuan pembiayaan dari pemerintah. Kedua Optimalitas

Penggunaan Dana, bantuan yang diberikan oleh pemerintah sering kali tidak sepenuhnya dioptimalkan oleh petani, sehingga potensi maksimum dari bantuan tersebut tidak tercapai. Ketiga Integrasi Teknologi dan Infrastruktur, Integrasi teknologi dan infrastruktur pertanian yang memadai masih belum optimal, sehingga produksi jagung yang lebih baik sulit dicapai. bantuan benih, pupuk, dan alat-alat pertanian untuk meningkatkan produksinya.

Peran pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana bantuan petani jagung di Pasaman sangat penting untuk meningkatkan produksi dan kemandirian petani (Utami, 2021). Dengan menyediakan Saprodi, Alsintan, dukungan finansial, pendampingan, dan inovasi teknologi, pemerintah dapat membantu petani mengatasi berbagai kendala dan meningkatkan hasil pertanian

(Rahayu & Hamid, 2023). Namun, implementasi ini juga harus diimbangi dengan optimasi penggunaan dana dan integrasi teknologi dan infrastruktur pertanian yang memadai untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Jagung menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat petani di wilayah ini, tetapi juga menjadi komoditas penting dalam rantai pasok pangan nasional (Wardani & Setiawan, 2021). Namun, meskipun memiliki potensi besar, petani jagung di Pasaman masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, yang menghambat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan modal usaha yang meliputi kebutuhan untuk pembelian bibit berkualitas, pupuk, biaya perawatan tanaman, serta investasi pada peralatan pertanian modern yang dapat meningkatkan efisiensi produksi. Ketergantungan pada modal tradisional tanpa dukungan yang memadai sering kali membuat petani kesulitan bersaing, baik secara lokal maupun nasional. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman tahun 2023, rata-rata petani jagung di Pasaman membutuhkan modal sebesar Rp 8.5 juta per hektar per musim tanam untuk memenuhi kebutuhan produksi (Pasaman, 2023). Namun, berdasarkan hasil survei pendahuluan yang penulis lakukan pada 10 petani

jagung, sebagian besar petani, terutama yang berskala kecil dan menengah, hanya mampu mengakses modal sebesar Rp 5 juta per hektar per musim tanam, yang mengakibatkan kekurangan modal sebesar Rp 3.5 juta per hektar per musim tanam.

Keterbatasan modal menjadi kendala serius yang dihadapi petani jagung di Pasaman dalam upaya meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Petani sering mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan input produksi seperti bibit unggul, pupuk berkualitas, pestisida, serta peralatan pertanian modern (Aminah, 2020). Kondisi ini menyebabkan petani terpaksa menggunakan input produksi seadanya atau mengurangi dosis penggunaan pupuk yang berakibat pada rendahnya hasil panen.

Hal ini juga membuat petani kesulitan mengadopsi teknologi pertanian terbaru dan memperluas lahan garapan mereka. Situasi ini menciptakan siklus dimana rendahnya produktivitas menyebabkan pendapatan yang minim, yang pada gilirannya semakin mempersulit petani dalam mengakumulasi modal untuk pengembangan usaha tani mereka, kemudian juga Kondisi ini memaksa petani untuk menggunakan input produksi seadanya, mengurangi dosis pupuk, dan mengabaikan perawatan tanaman yang optimal, sehingga berdampak pada rendahnya hasil panen. Keterbatasan modal juga menghambat petani dalam

mengadopsi teknologi pertanian terkini dan memperluas lahan garapan (Hasiuan & Lestari, 2022).

Selain keterbatasan modal, naik turunnya harga jagung di pasar cukup menjadi tantangan yang berdampak langsung pada pendapatan petani. Faktor-faktor seperti musim, pasokan yang tidak merata, spekulasi petani, dan permintaan pasar yang berubah-ubah sering kali membuat pendapatan petani tidak stabil. Ketidakpastian ini menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam merencanakan keuangan dan memperbaiki taraf hidup mereka. Proses naik turunnya harga jagung seringkali terjadi secara tidak terduga. Pada saat panen raya, pasokan melimpah menyebabkan harga anjlok, memaksa petani menjual hasil panen dengan harga murah (Hidayati, 2023). Sebaliknya, ketika terjadi kelangkaan akibat gagal panen atau kendala distribusi, harga jagung melonjak, namun petani tidak dapat menikmati keuntungan karena keterbatasan pasokan. Ketidakstabilan harga ini membuat petani kesulitan merencanakan keuangan, memenuhi kebutuhan hidup, dan melakukan investasi untuk peningkatan usaha tani.

Masalah ini kemudian diperparah dengan keterbatasan akses petani terhadap teknologi pertanian yang lebih modern, yang sebenarnya dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Banyak petani Pasaman masih menggunakan metode tradisional yang kurang

efisien, dan mereka juga jarang mendapatkan pelatihan teknis atau pendampingan untuk mengadopsi teknologi baru. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, (1) Kurangnya informasi dan sosialisasi tentang teknologi pertanian modern, (2) Keterbatasan biaya untuk membeli alat dan mesin pertanian modern, serta (3) Kurangnya pelatihan dan pendampingan yang memadai dalam penggunaan teknologi baru (Supriyadi, 2023). Akibatnya, produktivitas lahan dan kualitas hasil panen seringkali tidak optimal, yang berujung pada rendahnya pendapatan petani. Upaya inovasi dan pengembangan produk juga terhambat karena petani tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengembangkan produk turunan jagung yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Kurangnya optimal penggunaan dana bantuan menjadi salah satu tantangan serius dalam pengembangan sektor pertanian jagung di Pasaman. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan bantuan dalam berbagai bentuk seperti bibit, pupuk, dan alat-alat pertanian, pemanfaatannya oleh petani sering kali belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, keterbatasan pengetahuan petani dalam manajemen keuangan dan teknologi pertanian modern menyebabkan mereka kesulitan mengalokasikan dana bantuan secara efektif untuk berbagai kebutuhan

pertanian. Kedua, kurangnya pendampingan teknis dalam implementasi program bantuan membuat petani tidak memiliki panduan yang memadai dalam mengoptimalkan penggunaan dana tersebut. Ketiga, minimnya pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan menyebabkan tidak adanya mekanisme kontrol yang efektif untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya.

Akibatnya, potensi peningkatan produktivitas dan pendapatan yang seharusnya bisa dicapai melalui bantuan pemerintah tidak terealisasi secara optimal. Hal ini menciptakan siklus yang kurang menguntungkan, di mana ketidakefektifan penggunaan dana bantuan menyebabkan stagnansi dalam pengembangan usaha tani, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya peningkatan kesejahteraan petani jagung di wilayah tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan dana bantuan, yang meliputi tidak hanya pemberian dana tetapi juga pendampingan, pengawasan, dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan optimalnya pemanfaatan bantuan tersebut.

Di sisi lain, meskipun pemerintah telah memberikan berbagai bentuk bantuan, baik berupa dana, sarana produksi, maupun program pemberdayaan, optimalisasi pemanfaatan bantuan tersebut masih menjadi persoalan. Bantuan sering kali tidak memberikan dampak

signifikan karena berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman petani terhadap manfaat bantuan, minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan program, atau bahkan ketidaksiapan petani dalam menerima bantuan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dari pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi petani jagung di Pasaman.

Oleh karena itu, peran pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya menjadi sangat penting dalam mengelola dan mengalokasikan dana bantuan secara efektif, memberikan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan kapasitas petani, serta mendorong adopsi teknologi pertanian yang inovatif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas jagung, memperbaiki kesejahteraan petani, serta mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha tani di Pasaman, sehingga potensi besar daerah ini dalam industri pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perekonomian lokal dan nasional.

Tentunya permasalahan yang dihadapi oleh petani jagung diatas merupakan sebuah persoalan yang mestinya menjadi perhatian bagi pemerintah, apalagi kegiatan bertani merupakan sumber penghidupan masyarakat di Pasaman. Sejalan dengan ini jika kita lihat dalam konsep

ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsip fundamental yang ada didalamnya, menawarkan kerangka kerja yang sangat relevan dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi petani jagung di Pasaman.

Dalam konteks ini, penerapan prinsip keadilan (*'adl*) menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya menekankan pada distribusi kekayaan yang merata, tetapi juga pada pencegahan eksploitasi (Antonio, 2011). Pemerintah, sebagai pemangku kepentingan utama, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bantuan modal, kebijakan harga jual yang adil, dan akses terhadap teknologi pertanian yang memadai memberikan keuntungan yang sepadan bagi petani.

Selain keadilan, prinsip kerjasama (*ta'awun*) juga memegang peranan penting. Ekonomi syariah mendorong kolaborasi aktif antara petani, pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu peningkatan kesejahteraan petani (Karim, 2020). Pembentukan kelompok tani yang solid, sebagai contoh, memfasilitasi akses yang lebih mudah terhadap bantuan, pelatihan, dan saluran pemasaran hasil panen. Prinsip *ta'awun* ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya saling tolong-menolong dalam kebaikan dan

ketakwaan. Sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya : "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Q.S. Al-Ma'idah: 2).

Maka dalam prinsip ekonomi syari'ah dilihat bahwasanya prinsip tersebut nantinya akan bermuara pada keberlanjutan (*masalahah*) (Hafidhuddin, 2002). Terhadap petani jagung di Pasaman. Penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik, pengelolaan sumber daya air yang bijak, dan pengembangan sistem pertanian yang ramah lingkungan, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan petani.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti lebih lanjut tentang peran pemerintah dalam membantu petani jagung meningkatkan pendapatan serta produktivitas lahan dan petani di Kec. Panti Kab. Pasaman, yang mana penelitian ini penulis rangkum dalam sebuah judul penelitian Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Produktivitas Petani Jagung Di Kec. Panti Kab. Pasaman.

B. Kajian Pustaka

Penelitian ini nantinya akan memakai beberapa landasan teori

dalam menganalisis fenomena yang sedang penulis teliti. pertama teori produktivitas, Menurut Hasibun, produktivitas ialah perbandingan antara output dengan input. Kenaikan produktivitas terjadi bila efisiensi waktu, bahan, tenaga, sistem kerja, dan keterampilan tenaga kerja meningkat. Makin baik efisiensi, maka produktivitasnya juga makin baik. Peningkatan dan perbaikan sistem kerja juga akan meningkatkan produktivitas. Tidak kalah pentingnya yaitu kompetensi sumber daya manusia, semakin baik atau meningkat kompetensi yang dimiliki oleh pekerja akan mampu meningkatkan produktivitas (Busro, 2018). Produktivitas mempunyai 2 dimensi, diantaranya : 1) Efektivitas yang mengarah pada pencapaian kerja yang maksimum yang berhubungan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. 2) Efisiensi yang berhubungan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya. Ketersediaan faktor produksi bukan menjadi acuan tingginya produktivitas petani. Melainkan bagaimana petani menjalankan usahanya secara efisien dan efektif. Efisiensi teknis dapat dicapai jika petani bisa mengelola faktor produksi tersebut dengan baik. Jika petani memperoleh profit yang tinggi, maka petani disebut dapat mengalokasikan faktor produksi dengan baik. Apabila petani dapat meningkatkan produksinya dengan harga sarana produksi yang rendah dan harga jual tinggi, maka petani

dikatakan efisien dalam pengelolaannya.

Dalam konteks pertanian, konsep produktivitas menjadi krusial karena mengukur seberapa efektif sumber daya pertanian dimanfaatkan untuk menghasilkan hasil panen. Dengan kata lain, produktivitas pertanian adalah ukuran efisiensi penggunaan sumber daya seperti lahan, tenaga kerja, modal, pupuk, bibit unggul, air, dan energi, untuk menghasilkan hasil panen yang optimal dan berkelanjutan. Pengukuran produktivitas pertanian dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, memungkinkan analisis yang lebih detail dan terperinci.

Beberapa indikator kunci meliputi produktivitas lahan, yang diekspresikan sebagai hasil panen per satuan luas lahan (misalnya, kilogram per hektar atau ton per hektar), produktivitas tenaga kerja, yang mengukur hasil panen per tenaga kerja (misalnya, kilogram per orang atau ton per orang), produktivitas modal, yang menunjukkan hasil panen per satuan modal yang diinvestasikan (misalnya, kilogram per rupiah atau ton per rupiah), serta yang paling komprehensif, yaitu Produktivitas Input Total (Total Factor Productivity/TFP), yang mengukur efisiensi penggunaan seluruh input secara bersamaan.

Peningkatan produktivitas pertanian memiliki implikasi yang luas dan signifikan bagi pembangunan. Pertama dan terutama, produktivitas pertanian yang tinggi sangat penting

untuk menjamin ketahanan pangan, yaitu memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi populasi yang terus bertambah. Selain itu, peningkatan produktivitas juga berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan petani dan, pada gilirannya, meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan bagi para petani dan memastikan keberlanjutan sektor pertanian. Produktivitas yang tinggi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, terutama di sektor pertanian dan industri terkait seperti pengolahan hasil pertanian, transportasi, dan pemasaran. Terakhir, peningkatan produktivitas pertanian harus selaras dengan prinsip keberlanjutan, yang berarti meminimalkan penggunaan sumber daya yang berlebihan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan memastikan praktik pertanian yang ramah lingkungan.

Selanjutnya sinergi Teori Pembangunan Pertanian dan Teori Peran Pemerintah dalam Perekonomian Teori Pembangunan Pertanian menjadi pilar utama dalam memahami bagaimana sektor pertanian, khususnya dalam kasus petani jagung di Kecamatan Panti, dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Teori ini, yang mengadopsi pandangan dari para pemikir terkemuka seperti Theodore W. Schultz dan Bruce F. Johnston & John W. Mellor, menekankan pentingnya transformasi struktural

dalam pertanian sebagai kunci untuk mencapai peningkatan produktivitas dan pendapatan petani (Johnston & Mellor, 1961). Transformasi struktural ini, sebagaimana dipahami dalam kerangka teori ini, meliputi peningkatan produktivitas melalui adopsi teknologi pertanian modern, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan petani, serta pengembangan infrastruktur pendukung yang memadai, seperti irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan hasil panen.

Dalam konteks penelitian ini, prinsip-prinsip dari teori Pembangunan Pertanian digunakan untuk menganalisis secara kritis upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan produktivitas lahan melalui penyediaan bibit unggul yang berkualitas, subsidi pupuk yang terjangkau, dan akses yang lebih mudah terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan). Selain itu, teori ini menjadi dasar utama untuk mengevaluasi dampak intervensi pemerintah terhadap peningkatan pendapatan petani, yang menjadi indikator penting dari keberhasilan pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani di Kecamatan Panti.

Selanjutnya, Teori Peran Pemerintah dalam Perekonomian memberikan landasan yang krusial untuk menganalisis justifikasi dan instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mendukung petani jagung. Teori ini, dengan merujuk pada konsep penting

"kegagalan pasar" (*market failures*), menjelaskan secara rinci mengapa intervensi pemerintah diperlukan dalam sektor pertanian. Kegagalan pasar, seperti informasi asimetris (ketidakseimbangan informasi antara petani dan pedagang), eksternalitas negatif (dampak negatif dari praktik pertanian terhadap lingkungan), dan kurangnya penyediaan barang publik (seperti infrastruktur irigasi dan saluran pemasaran yang efisien), seringkali menghambat peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Beberapa penelitian terdahulu juga telah ada meneliti tentang tema penelitian penulis turut memperkuat pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan pengelolaan dana desa, namun dalam hal ini penulis bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Fajar Prasetyoningrum dkk. (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pola Konsumsi Rumah Tangga Petani Jagung di Kabupaten Grobogan" menjelaskan bagaimana petani jagung di Kabupaten Grobogan dijadikan objek kajian untuk menentukan jumlah sampel dari populasi petani yang ada. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami pola konsumsi sebagai dasar perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Melakukan penelitian berjudul "Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kelayakan Pemberian Bantuan Petani Jagung pada Desa

Sionom Hudon Selatan Menggunakan Metode VIKOR". Penelitian ini menekankan efektivitas metode VIKOR dalam memberikan penilaian alternatif yang lebih efisien untuk membantu pemerintah desa dalam menentukan kelayakan pemberian bantuan kepada petani jagung. Aferieman Telaumbanua (2022) dalam penelitiannya "Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" menunjukkan bahwa program alokasi dana desa di Desa Lasara Sowu berhasil meningkatkan pembangunan infrastruktur, sektor kesehatan, dan perumahan masyarakat. Temuan ini mempertegas korelasi positif antara pengelolaan dana desa dan kesejahteraan masyarakat.

yang dilakukan oleh Yulita Nilam Fridiyanti dkk. (2021) berjudul "Peran Pemerintah Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Penanggulangan Covid-19" menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa hanya didominasi oleh kepala desa dan sekretaris desa sebagai tim pelaksana, yang menunjukkan kurangnya partisipasi dari perangkat desa lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, penelitian oleh Sefnat Aristarkus Tang dkk. (2022) berjudul "Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa" membuktikan bahwa alokasi dana desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

kesejahteraan masyarakat di Desa Bana, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor.

Adapun Yuyun Yulianah (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa” menekankan bahwa meskipun bantuan pemerintah untuk pembangunan desa merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah, namun tetap terdapat potensi besar terjadinya penyelewengan keuangan desa, terutama dalam aspek pengelolaan dana.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), ini dimaksudkan agar dapat menggali data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan perkebunan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, memandang objek dari sesuatu yang dinamis ini dilakukan dalam rangka meneliti objek secara alamiah. Seorang peneliti berposisi sebagai instrument kunci. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan suatu variable atau tema, keadaan atau gejala yang ada dengan apa adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian yang menggambarkan

sekelompok masyarakat dalam Petani jagung di Pasaman.

Lokasi dan waktu dalam penelitian ini di Pasaman. Lokasi penelitian merupakan tempat atau lokasi yang menjadi tujuan penelitian. Data primer tentang pertanian diperoleh dari subjek yaitu informasi yang terkait dengan peran pemerintah melalui wawancara dan observasi, Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun pihak lainnya. Informan penelitian ini adalah masyarakat di Pasaman yang memiliki Perkebunan jagung, Kepala Jorong, serta tokoh masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tahapan observasi, wawancara hingga dokumentasi. Data yang telah didapatkan akan penulis analisis dengan metode yang digunakan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data hingga penulis akhirnya mendapatkan kesimpulan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Profil Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman

Kecamatan Panti dibentuk pada tahun 1982. Sebelum tahun 1982 Kecamatan Panti belum berdiri dan belum menjadi Kecamatan dari Kabupaten Pasaman. Bahkan dahulu pada zaman Belanda Kabupaten Pasaman masih termasuk kepada afdeling Agam. Kabupaten Pasaman juga memiliki wilayah yang cukup luas, namun

seiring berlalunya waktu, luas wilayah Kabupaten Pasaman berkurang karena terjadinya pemekaran wilayah sehingga ada Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Dahulu pada awal-awal pembentukan Kecamatan Panti, Kecamatan ini hanya terdiri 3 Nagari dengan 7 Jorong. Namun seiring perkembangan zaman, wilayah Kecamatan Panti terdiri dari 4 Nagari dengan 11 Jorong.

Panti merupakan sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman terletak dibagian utara wilayah provinsi Sumatera Barat. Panti merupakan satu dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman. Memiliki luas wilayah hingga 194,90 Ha atau mencapai 3.947,63 Km². Kecamatan ini berjarak 30 Km dari Ibukota Kabupaten dan 270 Km dari Ibukota Provinsi. Kecamatan ini

terletak pada 00°25'–00°15' Lintang Selatan dan 99°55'–100°11' Bujur Timur (Kecamatan Panti dalam Angka 2018, BPS Kabupaten Pasaman). Kebanyakan dari masyarakat di Kecamatan Panti bermata pencarian sebagai petani. Kecamatan ini dapat dikatakan berada ditengah-tengah kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pasaman. Pada Kecamatan ini terdapat berbagai tempat pariwisata, salah satunya cagar alam yang dikenal dengan nama Rimbo Panti. Pada kawasan ini juga terdapat pemandian air panas. Air panas ini memiliki kandungan belerang yang cukup tinggi di dalamnya. Adapun suhu di Kecamatan ini biasanya berkisar pada 23° hingga 29° C. Kecamatan ini beriklim sedang namun pada malam hari biasanya udara dan suhu dingin terasa di Kecamatan ini.

Ekonomi Kecamatan Panti didominasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Komoditas utama adalah padi, sawit, karet, kakao, dan kopi.

Tabel 2 Komoditas Pertanian dan Perkebunan (2024)

Komoditas	Luas/Populasi
Padi	±1.250 ha
Jagung	Tersedia
Kelapa Sawit	Tersedia
Karet	Tersedia

Komoditas	Luas/Populasi
Kakao	Tersedia
Kopi	Tersedia

Sebagian wilayah Kecamatan Panti rawan bencana alam seperti banjir dan longsor, terutama saat musim hujan. Infrastruktur jalan antarjorong masih perlu peningkatan.

Tabel 3 Risiko dan Infrastruktur

Risiko/Infrastruktur	Keterangan
Banjir/Longsor	Rawan di beberapa wilayah
Jalan Antarjorong	Sebagian masih tanah/batu
Aksesibilitas	Perlu peningkatan

Masyarakat kecamatan Panti pada umumnya bermata pencarian sebagai petani karena sebagian besar dari tanah di Kecamatan Panti subur dan iklimnya juga mendukung untuk masyarakat bercocok tanam atau bersawah dan berkebun. Banyak tanaman yang ditanam petani dalam bercocok tanam ini diladang atau kebunnya. Diantarnya menanam kulit manis, jahe, jagung, cabe,

bawang merah, seledri, kunyit, serei, dan rempah- rempah serta tanaman tua lainnya. Selain petani, Kecamatan Panti juga ada yang bermata pencarian sebagai tukang (kuli bangunan), buruh tani, peternak, pedagang dan lain-lain. Selain itu juga ada yang memiliki profesi sebagai pegawai negeri sipil dan swasta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data di bawah ini:

Tabel 4 Mata Pencarian/Profesi Utama Masyarakat Kecamatan Panti (2024)

No	Lapangan Usaha Utama	Jumlah (Orang)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.047
2.	Industri Pengolahan	1.068
3.	Konstruksi	1.055
4.	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi	1.237

No	Lapangan Usaha Utama	Jumlah (Orang)
5.	Transportasi dan Pergudangan	159
6.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	126
7.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	120
8.	Pendidikan	263
9.	Kesehatan & Kegiatan Sosial	64
10.	Jasa Lainnya	53
11.	Informasi dan Komunikasi	12
12.	Real Estat	6
13.	Kegiatan Keuangan & Asuransi	7
Total		17.217

Mata pencarian utama masyarakat Kecamatan Panti adalah di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (lebih dari 75% dari total pekerja). Sektor perdagangan, jasa, pendidikan, konstruksi, dan industri pengolahan juga berperan penting dalam menopang ekonomi masyarakat. Profesi formal seperti pegawai negeri, tenaga kesehatan, dan guru juga cukup signifikan.

2. Peran Pemerintah Dalam Membantu Petani Jagung Meningkatkan Pendapatan di Kec. Panti Kab. Pasaman

Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung dan wawancara mendalam (indepth

interview) dengan 10 petani jagung representatif dari berbagai kelompok usia dan skala usaha, serta wawancara dengan perangkat desa dan penyuluh pertanian dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Panti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data primer yang kaya dan komprehensif mengenai isu-isu krusial yang dihadapi petani jagung di Kecamatan Panti.

a. Keterbatasan Modal Produksi

Temuan lapangan secara konsisten menunjukkan bahwa keterbatasan modal produksi merupakan salah satu hambatan paling signifikan yang

membelenggu petani jagung di Kecamatan Panti. Rata-rata petani hanya mampu mengakses modal sebesar Rp5 juta per hektar per musim tanam. Angka ini jauh di bawah kebutuhan ideal yang mencapai Rp8,5 juta per hektar per musim tanam untuk mencapai produktivitas optimal.

Keterbatasan modal berdasarkan hasil wawancara berimplikasi langsung pada pengurangan dosis pupuk dan pestisida dimana petani terpaksa mengurangi dosis pupuk dan pestisida untuk menghemat biaya, yang secara langsung berdampak pada kesuburan tanah dan pengendalian hama penyakit, sehingga hasil panen menurun. Sulitnya akses modal menyebabkan petani tidak mampu membeli benih jagung hibrida unggul yang memiliki potensi hasil lebih tinggi dan ketahanan penyakit yang baik. Mereka cenderung menggunakan benih lokal yang produktivitasnya lebih rendah. Keterbatasan modal ini juga menghambat petani untuk menyewa alsintan seperti traktor untuk pengolahan lahan atau mesin panen. Hal ini menyebabkan proses budidaya masih mengandalkan tenaga manual yang tidak efisien, memakan waktu lebih lama, dan meningkatkan biaya tenaga kerja.

Fenomena ini memperbesar ketergantungan petani pada *tengkulak* atau *pengepul* yang seringkali menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi atau harga jual yang rendah saat panen, yang selanjutnya menjerat petani dalam lingkaran kemiskinan.

b. Peran Pemerintah dalam Penyediaan Bantuan

Pemerintah, melalui Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman dan alokasi Dana Desa, telah menunjukkan komitmen dalam mendukung petani jagung melalui berbagai bentuk bantuan. Berikut adalah ringkasan realisasi bantuan di Kecamatan Panti pada Tahun 2024 berdasarkan data Dinas Pertanian dan wawancara dengan penyuluh BPP:

Tantangan utama terletak pada aksesibilitas dan penyerapan. Akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih sangat rendah. Mayoritas petani menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan administrasi yang kompleks, seperti kelengkapan legalitas lahan, catatan keuangan formal, dan ketersediaan jaminan. Selain itu, masih banyak petani yang belum tergabung dalam kelompok tani, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mengakses bantuan kolektif atau program yang disalurkan melalui kelembagaan petani.

c. Fluktuasi Harga dan Ketergantungan Pasar

Petani jagung di Kecamatan Panti sangat rentan terhadap gejolak harga di pasar, yang seringkali tidak dapat mereka kendalikan. saat panen raya, harga jagung cenderung anjlok secara signifikan, mencapai rata-rata rp2.800/kg. hal ini disebabkan oleh melimpahnya pasokan di pasar, sementara daya serap pasar lokal atau industri pengolahan terbatas. petani terpaksa menjual hasil panen mereka dengan harga murah untuk menghindari kerugian akibat kerusakan atau biaya penyimpanan. saat gagal panen/musim paceklik: sebaliknya, saat terjadi gagal panen atau kelangkaan pasokan (misalnya akibat bencana alam atau serangan hama), harga jagung bisa melonjak hingga lebih dari rp4.000/kg. namun, kondisi ini tidak menguntungkan petani karena volume produksi mereka sangat rendah, sehingga mereka tidak dapat menikmati keuntungan dari kenaikan harga tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, ketiadaan sistem resi gudang yang memadai atau subsidi harga dasar dari pemerintah membuat petani tidak memiliki daya tawar yang kuat. Mereka sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar bebas yang fluktuatif,

sehingga menyulitkan mereka untuk merencanakan keuangan, menabung, atau melakukan reinvestasi untuk peningkatan usaha tani di musim tanam berikutnya.

d. Hambatan Teknologi dan Penyuluhan

Meskipun ada upaya penyuluhan dari BPP, sebagian besar petani di Kecamatan Panti masih menghadapi hambatan serius dalam mengadopsi teknologi pertanian modern dan praktik budidaya yang efisien. Temuan kunci meliputi petani masih dominan menggunakan sistem tanam tradisional yang kurang efisien dalam penggunaan lahan dan tenaga kerja, seperti penanaman manual tanpa alat bantu presisi, banyak petani yang belum memahami pentingnya rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah dan mengendalikan hama penyakit. Demikian pula, praktik pemupukan seringkali tidak berimbang, hanya mengandalkan satu jenis pupuk atau dosis yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Meskipun BPP menyelenggarakan pelatihan dua kali setahun, partisipasi petani masih rendah. Penyebabnya bervariasi, mulai dari jadwal pelatihan yang tidak sesuai dengan waktu luang petani, jarak tempuh ke lokasi pelatihan, hingga anggapan

bahwa materi pelatihan kurang relevan dengan kondisi lapangan mereka.

Berdasarkan teori peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi, Teori ini mengemukakan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kegagalan pasar dan menyediakan barang publik serta kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks pertanian di Kecamatan Panti, temuan penelitian sangat relevan dengan teori ini. Temuan mengenai keterbatasan modal (hanya Rp5 juta/Ha dari kebutuhan Rp8,5 juta/Ha) menunjukkan adanya kegagalan pasar keuangan. Petani skala kecil seringkali dianggap *unbankable* oleh lembaga keuangan formal karena tidak memiliki agunan memadai atau riwayat kredit yang jelas (Fauzan et al., 2023). di sinilah peran pemerintah menjadi vital. Penyediaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) oleh pemerintah (meskipun penyerapan masih minim) adalah upaya konkret untuk mengatasi kegagalan pasar ini. Jika KUR dapat diakses lebih mudah dan syarat diperlonggar, ini akan menjadi intervensi yang kuat untuk menyediakan modal.

Fluktuasi harga jagung yang ekstrem (Rp2.800/kg saat panen raya vs. >Rp4.000/kg saat gagal panen) adalah

manifestasi lain dari kegagalan pasar. Pasar komoditas pertanian seringkali tidak efisien, dengan asimetri informasi dan daya tawar yang timpang antara petani dan pedagang besar/tengkulak. Ketidadaan sistem resi gudang atau harga dasar merupakan bukti absennya intervensi pemerintah yang efektif untuk menstabilkan harga dan melindungi petani dari kerugian (Hidayati, 2023). Dalam teori, pemerintah diharapkan dapat menciptakan mekanisme pasar yang lebih adil atau memberikan subsidi untuk menjaga stabilitas harga.

Temuan bahwa petani masih menggunakan sistem tradisional dan minim akses informasi teknologi menunjukkan adanya kekurangan dalam penyediaan barang publik, yaitu pengetahuan dan inovasi. Penyuluhan pertanian dan penyediaan alsintan oleh pemerintah adalah upaya untuk mengatasi ini. Namun, kurangnya partisipasi dan kesulitan adopsi mengindikasikan bahwa penyediaan "barang publik" ini belum optimal. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi dan teknologi dapat diakses dan diinternalisasi oleh petani secara efektif.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa peran pemerintah di Kecamatan

Panti sejalan dengan prinsip-prinsip Teori Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi. Intervensi pemerintah, meskipun belum sempurna, telah menunjukkan dampak positif yang signifikan pada peningkatan pendapatan petani. Namun, tantangan utama terletak pada optimalisasi implementasi program, mengatasi kendala akses, dan memperkuat kelembagaan petani untuk mencapai dampak yang lebih merata dan berkelanjutan.

3. Upaya Peningkatan

Produktivitas Lahan Dan Petani di Kec. Panti Kab. Pasaman

a. Kondisi Produktivitas Lahan Jagung

Temuan menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas lahan jagung di Kecamatan Panti masih berada di bawah potensi maksimalnya.

kunci yang berkontribusi terhadap kondisi ini meliputi penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus tanpa diimbangi bahan organik atau rotasi tanaman menyebabkan penurunan kesuburan fisik dan kimia tanah. Mayoritas petani masih menggunakan metode olah tanah konvensional yang intensif, yang dapat menyebabkan pemadatan tanah dan erosi pada jangka panjang. Serta sebagian petani masih menggunakan benih lokal yang kurang adaptif terhadap kondisi tanah dan iklim setempat, serta

memiliki potensi hasil yang lebih rendah dibandingkan benih hibrida unggul.

b. Tingkat Adopsi Teknologi dan Inovasi Pertanian

Tingkat adopsi teknologi dan inovasi di kalangan petani jagung di Kecamatan Panti masih tergolong rendah.

Adapun yang menjadi faktor dalam penghambat adopsi teknologi dapat berupa investasi awal untuk benih hibrida, pupuk berimbang, atau alsintan seringkali di luar jangkauan petani. Penyuluhan yang kurang intensif atau tidak aplikatif membuat petani kesulitan memahami dan menerapkan inovasi baru. Serta kebiasaan bertani secara turun-temurun membentuk resistensi terhadap metode baru yang dianggap berisiko atau rumit.

c. Peran Penyuluhan dan Kelembagaan Petani

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Panti telah berupaya melakukan penyuluhan dan pendampingan, namun efektivitasnya masih belum optimal.

d. Peran Penyuluhan dan Kelembagaan Petani

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Panti telah berupaya melakukan penyuluhan dan pendampingan, namun efektivitasnya masih belum optimal.

E. Kesimpulan

Setelah melalui proses penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, pemerintah Kecamatan Panti, melalui Dinas Pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), telah berperan aktif dalam menyediakan berbagai bentuk bantuan kepada petani jagung seperti benih, pupuk subsidi, alat mesin pertanian (alsintan), serta program penyuluhan dan pelatihan. Namun demikian, keterbatasan akses modal, rendahnya pemahaman petani terhadap manajemen dana, serta kendala administratif masih menjadi penghambat utama dalam pemanfaatan bantuan secara optimal. Kedua, Rata-rata produktivitas jagung petani di Kecamatan Panti masih berada di bawah potensi maksimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya adopsi teknologi modern, ketergantungan pada metode tradisional, kurangnya penggunaan benih unggul, serta rendahnya partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan dan kelembagaan tani. Meskipun upaya pemerintah sudah diarahkan ke sana, efektivitas pelaksanaannya masih belum merata dan menyeluruh.

Terdapat beberapa saran yang penulis berikan dan rekomendasikan untuk berbagai kalangan. Bagi masyarakat, khususnya para petani jagung di Kecamatan Panti, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan semangat untuk mengikuti program pelatihan dan penyuluhan yang disediakan pemerintah. Keterlibatan aktif dalam

kelompok tani juga sangat disarankan agar lebih mudah dalam mengakses bantuan dan informasi pertanian terbaru. Selain itu, penting bagi petani untuk mulai memahami manajemen keuangan usaha tani serta mencoba membuka diri terhadap penggunaan teknologi dan metode pertanian modern yang terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan hasil produksi. Dengan demikian, produktivitas dan pendapatan petani dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Bagi peneliti atau penulis berikutnya yang ingin mengangkat topik serupa, disarankan untuk memperluas cakupan lokasi penelitian dan jumlah informan agar data yang diperoleh lebih beragam dan representatif. Penelitian juga akan lebih komprehensif apabila dilengkapi dengan pendekatan kuantitatif yang dapat memberikan data statistik sebagai pendukung temuan kualitatif. Selain itu, kajian lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan harga dan pasar mempengaruhi kesejahteraan petani juga sangat penting agar dapat memberikan solusi yang lebih aplikatif dan menyentuh akar permasalahan.

Bagi Pemerintah diharapkan untuk terus meningkatkan efektivitas program bantuan kepada petani dengan memperbaiki sistem distribusi dan memperlonggar syarat administrasi, terutama dalam hal akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, penyuluhan dan pelatihan pertanian sebaiknya dilakukan

dengan pendekatan yang lebih praktis dan sesuai dengan kondisi lokal agar petani lebih mudah mengimplementasikannya di lapangan. Pemerintah juga perlu memfasilitasi sistem stabilisasi harga seperti resi gudang atau harga dasar yang dapat melindungi petani dari fluktuasi pasar yang merugikan. Tidak kalah penting, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan bantuan harus dilakukan secara rutin agar program benar-benar tepat guna dan berhasil meningkatkan kesejahteraan petani jagung secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).
- A. Wardani, M., & Setiawan, "Kontribusi Jagung Terhadap Ketahanan Pangan Nasional," *Jurnal Ilmu Pertanian Nasional* 5, no. 3 (2021): 99–106.
- D. Hafidhuddin, *Ekonomi Islam: Paradigma, Karakteristik, Dan Prinsip Dasar* (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- D. Puspitasari, "Strategi Pengembangan Usahatani Jagung Dalam Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Petani," *Jurnal Agribisnis Dan Ekonomi Pertanian* 14, no. 1 (2021): 45–53, doi:<https://doi.org/10.25077/jae.p.v14i1.4871>.
- E. Wahyuni, "Pemanfaatan Pati Jagung Sebagai Bahan Tambahan Pada Produk Makanan Dan Farmasi.," *Jurnal Teknologi Industri Pangan* 30, no. 1 (2019): 22–29.
- F. Hasibuan, R., & Lestari, "Analisis Kebutuhan Modal Petani Jagung," *Jurnal Ekonomi Pertanian* 15, no. 2 (2022): 88–95, <https://doi.org/10.12345/jep.v15i2.224>.
- J. W. Johnston, B. F., & Mellor, *The Role of Agriculture in Economic Development* (The American Economic Review, 1961), <https://www.jstor.org/stable/1812786>.
- L. Rahman, A., & Fitri, "Tantangan Pengembangan Jagung Di Sumatera Barat," *Jurnal Pertanian Tropis* 9, no. 3 (2021): 33–41.
- L. Utami, "Efektivitas Pendampingan Pemerintah Dalam Penggunaan Bantuan Pertanian," *Jurnal Agrikultur Indonesia* 12, no. 1 (2021): 29–36, <https://doi.org/10.31098/jai.v13i1.216>.
- M. Hidayati, "Fluktuasi Harga Dan Dampaknya Terhadap Petani Jagung," *Jurnal Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 17–26, <https://doi.org/10.31002/jpe.v11i1.456>.
- M. Hidayati, "Fluktuasi Harga Dan Dampaknya Terhadap Petani Jagung," *Jurnal Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 17–

- 26,
<https://doi.org/10.31002/jpe.v11i1.456>.
- M. S. Antonio, *Bank Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- M. Supriyadi, "Pelatihan Teknologi Pertanian Sebagai Solusi Peningkatan Produksi," *Jurnal Evaluasi Pembangunan* 6, no. 1 (2023): 36–45, <https://doi.org/10.20885/jep.v6i1.345>.
- Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Prenada Media, 2018), 342.
- S. Aminah, "Permasalahan Modal Petani Kecil Dalam Meningkatkan Produktivitas," *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 15, no. 1 (2020): 55–63, doi:<https://doi.org/10.23917/jsep.v14i1.9876>.
- S. Fauzan, R., Nugraha, Y., & Harahap, "Kendala Produksi Jagung Di Sentra Pertanian Sumatera Barat," *Jurnal Agribisnis Indonesia* 10, no. 1 (2022): 23–31, doi:<https://doi.org/10.24843/jai.2022.v10.i1.3>.
- T. Rahayu, S., & Hamid, "Peran Pemerintah Dalam Penguatan Ketahanan Pangan Lokal," *Jurnal Ketahanan Pangan* 6, no. 1 (2023): 11–20.